

Analisis Pengaruh Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Angelica Sinaga^{1*}, Ananda Fazhira², Annisa Dina Maisarah Hsb³, Nandita Olivia Natasya⁴, Sonita Putri Natalia⁵

¹⁻⁵Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kota Medan, Sumut
E-mail: angelsinaga452@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5976>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 15 Mar 2026

Accepted: 31 Mar 2026

Kata Kunci:

Pengeluaran Pemerintah,
Pajak Daerah,
Pertumbuhan Ekonomi,
Sumatera Utara.

Keywords:

Government
Expenditure, Regional
Taxes, Economic
Growth, North Sumatra.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series tahun 2020–2025 dari Badan Pusat Statistik, meliputi pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan pengeluaran pemerintah meningkat pada 2020–2024, namun menurun pada 2025 akibat faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan setelah kontraksi pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, mencerminkan naiknya aktivitas ekonomi dan kepatuhan masyarakat. Secara umum, pajak dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan pengeluaran pemerintah karena memengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

This study aims to analyze the relationship between taxes, economic growth, and government spending in North Sumatra Province. Government spending is an important instrument of fiscal policy to promote development and public welfare. The study uses a quantitative approach with secondary time series data from 2020–2025 from the Central Statistics Agency (BPS), covering local government spending, economic growth (GRDP), and motor vehicle tax revenue. Data were collected through documentation and analyzed descriptively. The results show that government spending increased in 2020–2024, but decreased in 2025 due to economic factors. Economic growth has recovered after a contraction in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Motor vehicle tax revenue has increased annually, reflecting increased economic activity and public compliance. In general, taxes and economic growth are closely related to government spending because they affect the ability to finance development and public services.



This is an open access article under the CC–BY–SA license.

How to Cite: Angelica Sinaga, et al (2026). Analisis Pengaruh Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, 4(4) 23160-23167. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5976>

PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengeluaran pemerintah, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Menurut Sadono Sukirno, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan adanya pengeluaran pemerintah yang efektif, aktivitas ekonomi dapat meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber utama

pembiayaan pengeluaran pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Peningkatan penerimaan pajak akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja publik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan pengeluaran. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat seperti produksi, konsumsi, dan investasi juga mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah.

Besarnya pengeluaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memperoleh sumber penerimaan negara maupun daerah. Salah satu sumber penerimaan yang paling penting adalah pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat strategis karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Menurut Rudiger Dornbusch dan Stanley Fischer, pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah sekaligus mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik.

Selain pajak, pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka aktivitas ekonomi masyarakat seperti konsumsi, investasi, dan produksi juga meningkat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya penerimaan pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan belanja publik dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang di Indonesia. Berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta jasa memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan penerimaan pajak dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dapat mempengaruhi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara pajak, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara sistematis untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik serta laporan statistik ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data time series selama periode 2020–2025 yang meliputi data pengeluaran pemerintah daerah, data pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta data penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari publikasi statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan sumber resmi pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang telah dipublikasikan dalam laporan statistik resmi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel serta penjelasan deskriptif untuk melihat kecenderungan perkembangan masing-masing variabel dari tahun ke tahun. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pajak, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

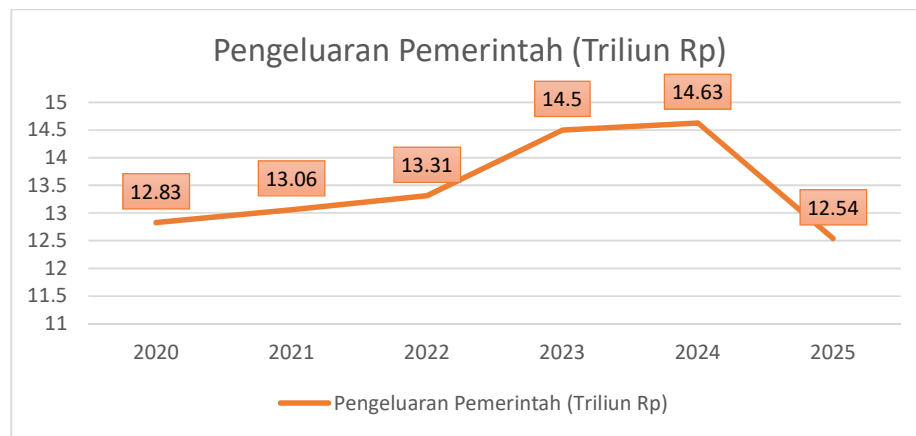
Pengeluaran Pemerintah

Di Provinsi Sumatera Utara, pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengeluaran pemerintah, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, total belanja daerah atau pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Data Pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara

Berikut contoh data pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Triliun Rp)
2020	12,83
2021	13,06
2022	13,31
2023	14,50
2024	14,63
2025	12,54



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

1. Tahun 2020 mencatat nilai belanja nominal terendah dalam rentang ini karena pendapatan negara yang tertekan hebat oleh pandemi COVID-19.
2. BPS mencatat bahwa pada Kuartal III-2025, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level terendah dalam 14 tahun terakhir, yaitu hanya tumbuh sekitar 4,89%. Hal ini dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan dan penyesuaian jadwal belanja kementerian/lembaga

Struktur Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah biasanya dialokasikan ke beberapa jenis belanja, antara lain:

1. Belanja Operasi
Belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.
2. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, serta sarana pelayanan publik.
3. Belanja Transfer
Belanja ini merupakan transfer dana kepada pemerintah daerah lainnya atau desa untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai perkembangan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Oleh karena itu, peningkatan PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut mengalami perkembangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut memengaruhi beberapa sektor penting seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Pada tahun 2021 perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen yang didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan namun tetap berada pada tingkat yang stabil yaitu 5,05 persen, kemudian pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi 5,11 persen.

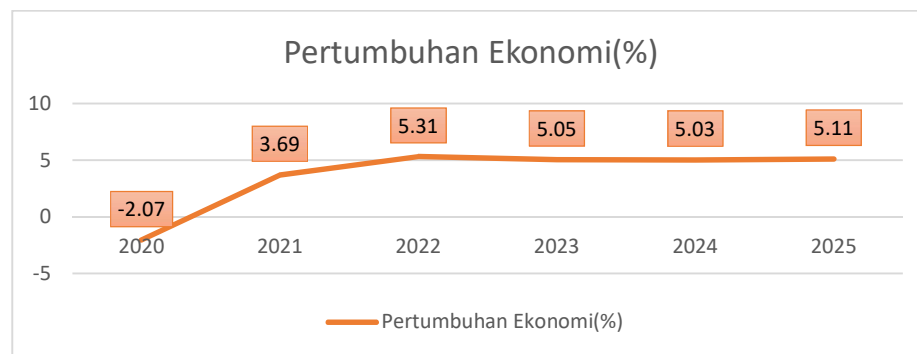
Secara umum, perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi setelah pandemi serta peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah secara bertahap mengalami perbaikan dan tetap mampu tumbuh secara stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Data Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Berikut contoh data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03
2025	5,11

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*



Struktur PDRB Sumatera Utara

Berdasarkan struktur PDRB, beberapa sektor memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sumatera Utara, antara lain:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Perdagangan besar dan eceran.
3. Industri pengolahan.
4. Konstruksi dan transportasi.

Berdasarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), beberapa sektor memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan persentase sekitar 23,5 persen. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara masih banyak bergantung pada sektor primer, khususnya aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi dan transportasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Keberadaan sektor-sektor tersebut berperan penting dalam mendorong aktivitas produksi, distribusi, serta perdagangan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, perekonomian Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen. Pemulihan ekonomi tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,31 persen, kemudian relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen, 2024 sebesar 5,03 persen, dan 2025 sebesar 5,11 persen. Dalam periode pemulihan tersebut, sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sekitar 13 persen pada tahun 2023, yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan, serta distribusi barang antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut turut berperan dalam mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Pajak

Di Provinsi Sumatera Utara, penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan. Penerimaan pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan masyarakat.

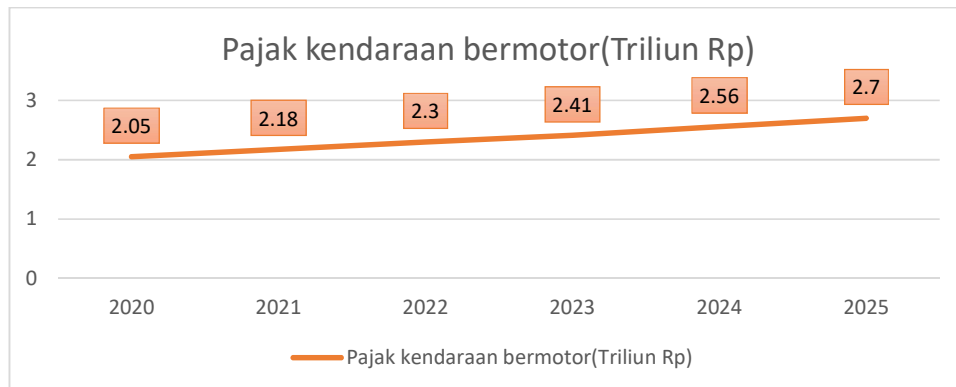
Data penerimaan pajak daerah biasanya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah dalam laporan keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Data Pajak Daerah Sumatera Utara

Berikut contoh data penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun	Pajak kendaraan bermotor (Triliun Rp)
2020	2,05
2021	2,18
2022	2,30
2023	2,41
2024	2,56
2025	2,70

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*



Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

1. Tahun 2020 – Rp 2,05 triliun

Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara tercatat sekitar Rp2,05 triliun. Jumlah ini tergolong relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Pandemi tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga sebagian masyarakat menunda atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Tahun 2021 – Rp 2,18 triliun

Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp2,18 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi setelah masa pandemi mulai terkendali. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, salah satunya melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan keringanan denda bagi masyarakat yang menunggak pajak. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk kembali membayar pajak kendaraan sehingga penerimaan daerah dari sektor tersebut mengalami peningkatan.

3. Tahun 2022 – Rp 2,30 triliun

Pada tahun 2022 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kembali mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp2,30 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai inovasi pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

4. Tahun 2023 – Rp 2,41 triliun

Pada tahun 2023 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara mencapai sekitar Rp2,41 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tetap menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tahun 2024 – Rp 2,56 triliun

Pada tahun 2024 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kembali meningkat menjadi sekitar Rp2,56 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Samsat. Selain itu, pemerintah juga mulai memanfaatkan sistem pembayaran pajak secara digital atau elektronik, seperti layanan e-Samsat, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

6. Tahun 2025 – ± Rp 2,70 triliun (target)

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara mencapai sekitar Rp2,70 triliun. Target ini disusun dengan mempertimbangkan tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti memperluas layanan pembayaran pajak digital, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat sistem administrasi perpajakan daerah. Kontribusi Pajak terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Melalui pengeluaran tersebut, pemerintah dapat menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, terutama untuk kegiatan

pembangunan, hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum, peningkatan pelayanan publik, serta dukungan terhadap berbagai sektor ekonomi dapat membantu meningkatkan kegiatan produksi dan perdagangan di daerah.

Selain itu, pajak juga memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Di Provinsi Sumatera Utara, penerimaan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran pembangunan. Pendapatan daerah secara keseluruhan juga mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Pendapatan daerah tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari retribusi daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya pendapatan daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu* yang menyatakan bahwa “*pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pajak, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

SIMPULAN

Pengaruh positif Pajak terhadap Pengeluaran Pemerintah

Variabel pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerimaan pajak meningkat, pengeluaran pemerintah tidak selalu meningkat, bahkan dapat cenderung menurun. Kondisi ini dapat terjadi karena pemerintah mungkin lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi belanja meskipun penerimaan pajak meningkat. Selain itu, peningkatan pajak juga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pemerintah menyesuaikan kebijakan pengeluarannya. Dengan demikian, hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, tetapi dapat mendorong pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih efisien.

Pengaruh Positif Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang sehingga pendapatan daerah dan penerimaan pajak pemerintah ikut meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan pengeluaran dalam berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Negatif Pajak Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pengaruh negatif pajak terhadap pengeluaran pemerintah dapat terjadi apabila pajak yang dikenakan terlalu tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan aktivitas ekonomi. Ketika pendapatan masyarakat berkurang karena beban pajak, tingkat konsumsi dan kegiatan usaha juga dapat menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah. Jika penerimaan pajak menurun, maka kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga dapat menjadi lebih terbatas. Selain itu, pajak yang terlalu tinggi juga dapat menghambat investasi dan kegiatan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan daerah.

Pengaruh Negatif Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau mengalami penurunan dapat memberikan dampak negatif terhadap pengeluaran pemerintah. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun, aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi masyarakat juga ikut berkurang. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pemerintah dari berbagai sumber, seperti pajak dan pendapatan daerah, menjadi lebih rendah. Akibatnya, kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Sitaniapessy, H. A. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economica*, 9(1), 38-51.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal adjustments in OECD countries: Composition and macroeconomic effects. NBER Working Paper.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5).
- Engen, E., & Skinner, J. (1996). Taxation and economic growth. *National Tax Journal*.
- Richard A. Musgrave, R. A., & Peggy B. Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Pemerintah Republik Indonesia.
- David Alan Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177-200.
- Norman Gemmell, N. (1996). Evaluating the impacts of public spending on economic growth. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 58(1), 1-23.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Kurniawan, A., & Sari, M. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Review*, Universitas Dehasen Bengkulu.
- Hidayat, R., & Nugroho, S. 2023. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Malang.